

PROSPEK PEMBANGUNAN MASYARAKAT PASCA KONFLIK SAMBAS

Community Development Prospect Of Post-Conflict Sambas

RAUDATUL ULUM

RAUDATUL ULUM

ISekretariat Badan Litbang dan Diklat
Kementerian Agama
Gedung Kementerian Agama RI Jalan M.H.
Thamrin No. 6, lt. 17 Jakarta
Telp. (021)3920668,3920688
Faks (021) 3920668
e-mail: gelombanglaut@gmail.com
Naskah diterima: 4 Februari 2013
Naskah direvisi: 22 Pebruari - 3 Maret 2013
Naskah disetujui: 5 Maret 2013

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan upaya untuk memahami perkembangan masyarakat korban konflik Sambas yang terjadi antara etnis Madura dan Melayu yang dilakukan dengan pendekatan deskriptif bersifat kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam terhadap informan yang terlibat dalam program relokasi serta mereka yang terlibat dalam usaha perdamaian. Kemudian data diolah dan disajikan melalui teknik analisis deskriptif. Penelitian ini menghasilkan deskripsi dan proses relokasi sebagai bagian dari strategi antara untuk capain relonsiliasi sosial melalui diplomasi budaya. Dalam hal ini, digambarkan tentang kehidupan masyarakat di relokasi serta upaya-upaya perdamaian dalam rangka merekonsiliasi. Berdasarkan analisis dapat disimpulkan tentang adanya peluang perdamaian dan sebuah kesempatan menciptakan masyarakat baru yang harmonis.

Kata kunci: *Prospek, Masyarakat, Konflik.*

ABSTRACT

This study is an attempt to understand the development of conflict-affected communities of Sambas that occurred between Madurese and Malay. It is performed with a qualitative descriptive approach. The data were collected through in-depth interview technique towards informants involved in the re-location program and peace efforts. The data were analyzed and presented through descriptive analysis techniques to describe the refugee's lives and peace efforts in the framework of reconciliation. The result of the study show cultural diplomacy as an effective process towards reconciliation. Therefore, it can be concluded that there are new chances opportunities to create peace and harmonious society.

Keywords: *Prospects, Community, Conflict.*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Konflik sosial di Kalimantan Barat adalah peristiwa yang kerap kali terjadi. Konflik sosial yang termanifestasi dalam bentuk fisik diperkirakan terjadi sejak 1770-1790 (Supriyadi, 2011). Pada saat itu, menurut sejarah telah terjadi benturan besar antara komunitas etnis Tionghoa dan etnis Melayu, lebih tepatnya konflik antara Kerajaan Sambas dengan Kongsi China. Konflik disebabkan perlawanan kongsi China yang dipekerjakan di penambangan emas yang didatangkan oleh pihak kerajaan Sambas dan Mempawah. Kongsi China sempat mendeklarasikan Republik Lan Fang yang membuat repot kerajaan, kemudian meminta bantuan Belanda di Batavia untuk menumpas pemberontakan itu.

Konflik berikutnya terjadi antar komunitas etnis Tionghoa dan etnis Dayak pada tahun 1967. Konflik tersebut sebenarnya terjadi atas banyak kepentingan, faktor utama sebagai penyebab adalah sinyalemen pemberontakan PGRS PAR-AKU (Partai Komunis Kalimantan Utara), benturan dengan skala besar mengakibatkan evakuasi besar-besaran warga Tionghoa dari wilayah pedalaman.

Kemudian terjadi konflik yang melibatkan antara etnis Dayak dan Madura sepanjang kurun tahun 1950 sampai 1999, setidaknya telah terjadi 13 kali (Supriyadi, 2011). Konflik terbesar dua suku tersebut terjadi pada tahun 1997 yang sebarannya sebagian besar wilayah Kalbar.

Konflik terbesar mutakhir melibatkan etnis Melayu dan Madura terjadi pada tahun 1999, peristiwa tersebut mencengangkan banyak pihak dan menimbulkan banyak spekulasi, adapun pemicu dari peristiwa tersebut adalah pembunuhan yang dilakukan orang Madura terhadap orang Melayu. Dalam hal ini, dampak benturan fisik tersebut menyebabkan sekitar 48.000 pengungsi yang tersebar di beberapa tempat penampungan yang ada di Kota Pontianak dan Kabupaten Pontianak. Tidak berhenti sampai disitu, benturan terus berlangsung dalam skala kecil secara sporadis pada

tahun 2000, 2001 dan 2002 di sebagian wilayah Kota Pontianak dan Kabupaten Pontianak (Subro, 2011:20).

Kenyataan pahit etnis Madura yang terpaksa kehilangan hak-haknya sebagai manusia yang merdeka dan menjadi pengungsi di negeri sendiri merupakan pukulan telak terhadap masa depan pluralisme dan multikulturalisme sebagai roh kebangsaan Indonesia yang berdaulat dan bermartabat.

Terlepas dari semua cerita penderitaan tersebut, muncullah kebijakan relokasi. Penanganan konflik sendiri terdiri dari tiga utama, pertama adalah penyelamatan, kedua pemulihan (konseling trauma), ketiga adalah rekonsiliasi atau penanganan akhir, karena tidak dapat diwujudkan maka dilaksanakan kebijakan relokasi. Pilihan relokasi berangkat dari ketidakmungkinan pengembalian etnis Madura ke Sambas, sebagai transisi dilakukan penempatan di daerah baru bagi pengungsi. Alasan utama dari relokasi adalah menghindari dampak sosial yang lebih besar dari pengungsian. Menyangkut penanganan akhir pengungsian, sejatinya ada beberapa pilihan, pertama dengan program relokasi, kedua inisiatif mandiri dengan penyisipan yang menyebar di sekitar pemukiman penduduk Kota Pontianak dan Kabupaten Pontianak, ketiga pindah ke tempat lain misalnya kembali ke Pulau Madura, Jawa dan Sumatra.

Relokasi pengungsi eks Sambas terdiri atas lima tahapan, awalnya dibuat suatu permodelan Satuan Proyek 1 yang bersandarkan pada standar program transmigrasi (perumahan standar transmigrasi). Meskipun kebijakan relokasi sempat mengalami banyak hambatan terutama dari sebagian pengungsi yang ingin menyelesaikan upaya perdamaian sebagai *bargaining* dengan menempatkan diri secara mandiri di sekitar Kota Pontianak, akhirnya seiring waktu sejak tahun 2000 relokasi terwujud di beberapa lokasi.

Perdamaian adalah sebuah kebutuhan, untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperlukan sebuah upaya rekonsiliasi. Tujuan utama dari rerekonsiliasi adalah menciptakan kembali masyarakat

ke dalam sebuah sistem hubungan yang baru, lebih baik dan menjanjikan. Pasca pertikaian dua atau lebih etnis tentunya diperlukan suatu masa dan usaha pemulihan hubungan, dalam hal ini diperlukan banyak pihak terutama Negara untuk mengeluarkan kebijakan yang dapat memfasilitasi dan mengintervensi suatu usaha sosial menuju suatu keadaan yang ideal. Untuk itu perlu suatu penelitian yang mendalam untuk mengkaji kemungkinan-kemungkinan baru dari keadaan yang terjadi sampai saat ini.

Perumusan Masalah

Penelitian ini dilakukan untuk memahami perkembangan masyarakat eks korban konflik Sambas dan melibatkan diri dalam program relokasi, serta memahami tentang peluang perdamaian. Aspek-aspek yang diteliti dalam penelitian ini adalah adanya kemungkinan perubahan dari program penanganan pengungsi relokasi, dalam hal ini relokasi sebagai komunitas baru dilihat sebagai upaya pembangunan masyarakat baru yang berdaya. Aspek lain yang diteliti adalah hambatan dalam hal menumbuhkan inisiasi perdamaian terutama menyangkut kebijakan untuk mencegah dan mengintervensi konflik baru. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini dirumuskan dalam sebuah pertanyaan “Bagaimana prospek pembangunan masyarakat melalui program relokasi dan inisiasi perdamaian pasca konflik sosial antara etnis Melayu dan Madura di Kalbar?”

Tujuan Penelitian

1. Memahami prospek pembangunan masyarakat korban konflik Sambas dengan adanya relokasi sebagai sebuah program untuk menciptakan kembali sebuah komunitas.
2. Memahami prospek rekonsiliasi antara etnis Madura dan Melayu yang terlibat konflik pada tahun 1999 sebagai sebuah usaha untuk menciptakan kembali masyarakat yang harmonis.

Kerangka Konseptual

Secara umum *community development* dapat didefinisikan sebagai kegiatan pengembangan masyarakat yang diarahkan untuk mem-

perbesar akses masyarakat untuk mencapai kondisi sosial-ekonomi-budaya yang lebih baik dibandingkan dengan kondisi sebelum adanya kegiatan pembangunan. Sasaran yang ingin dicapai dalam *community development* adalah kapasitas masyarakat dan sasaran kesejahteraan.

Assumsi yang fundamental menurut Ross (1967) terhadap *Community Social Work* dapat dibagi menjadi 6 (enam) kategori, yakni:

Komunitas dapat mengembangkan kapasitasnya untuk menghadapi masalah-masalah mereka;

1. Orang-orang ingin berubah dan memiliki kemampuan untuk melakukannya;
2. Orang-orang perlu berpartisipasi dalam pembuatan, penyesuaian, dan pengendalian perubahan penting yang terjadi dalam komunitasnya;
3. Perubahan dalam kehidupan masyarakat yang berdasarkan kepada *self-imposed* dan *self developed* memiliki pengertian dan ketetapan bahwa perubahan yang dipaksakan tidak dapat dilakukan;
4. Sebuah “pendekatan yang holistik” dapat lebih berhasil dalam mengatasi permasalahan yang tidak dapat diatasi oleh “pendekatan yang terfragmentasi”;
5. Demokrasi membutuhkan partisipasi dan tindakan yang kooperatif dalam persoalan masyarakat, dan orang-orang harus mempelajari berbagai keterampilan yang membuatnya menjadi memungkinkan;
6. Pada umumnya orang-orang membutuhkan bantuan dalam pengorganisasian untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya sebagai individu membutuhkan bantuan dalam mengatasi kebutuhan individualnya.

Istilah konflik menurut Webster seperti dikutip (Rubin, 2009:9) adalah suatu “perkelahian, peperangan, atau perjuangan” berupa konfrontasi fisik antara beberapa pihak. Lebih lanjut Rubin (2009:10) menjelaskan konflik berarti persepsi mengenai perbedaan kepentingan (*perceived*

divergence of interest), atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dapat dicapai secara simultan.

Konflik menurut Lewis merupakan proses yang bersifat instrumental dalam pembentukan, penyatuan dan pemeliharaan struktur sosial. Konflik dapat menempatkan dan menjaga garis batas antara dua atau lebih kelompok. Konflik dengan kelompok lain dapat memperkuat kembali identitas kelompok dan melindunginya agar tidak lebur ke dalam dunia sosial sekelilingnya. Seluruh fungsi positif konflik tersebut dapat dilihat dalam ilustrasi suatu kelompok yang sedang mengalami konflik dengan kelompok lain.

Berkaitan dengan pecahnya konflik terbuka di Kalimantan Barat, beberapa riset mencoba membuka peluang untuk mencari tahu tentang sebab musababnya. Dalam hal tersebut Purwana (2003:58) melihat peluang untuk mempertemukan pluralisme etnis dalam tatanan sosial budaya. Dia menyajikan informasi berharga tentang modal sosial yang dimiliki oleh etnis Melayu Sambas dan Madura. Bagi Purwana modal sosial tersebut dapat menjadi landasan kehidupan multikulturalisme bagi kedua etnis yang terlibat kerusakan sosial di Kabupaten Sambas. Meskipun begitu, secara umum penelitian ini belum menjawab bagaimana modal sosial masing-masing etnis dapat membentuk relasi atau pranata yang mengarah pada perdamaian.

Bertolak dari kasus lain, Kristianus (2009:15) menemukan modal sosial pada orang Dayak dan orang Madura. Kedua kelompok etnis hidup dapat berdampingan. Interaksi sosial berjalan baik dan lancar. Ditemukan pula bahwa di sejumlah wilayah Kalbar ditemukan inisiatif lokal yang bisa dianggap sebuah awal terbentuknya mekanisme penyelesaian sengketa sosial antar etnis Atok (2005). Dua penelitian ini memang cukup berhasil menjelaskan fakta kemungkinan rekonsiliasi antar etnis. Namun sayangnya, penelitian-penelitian yang sangat berharga ini dilakukan di wilayah yang tidak mengalami konflik kekerasan berskala masif. Temuan penelitian yang bersifat kasuistik agak sulit dijadikan landasan yang lebih

umum sifatnya (Beger, 1981).

Istilah relokasi diberikan oleh pemerintah dan masyarakat yang terlibat, relokasi di Kalimantan Barat merupakan pemukiman kembali (*resettlement*) dengan menggunakan “model transmigrasi”. Dengan kata lain, secara umum pendekatan pembangunan berdiri pada pondasi dan struktur program transmigrasi. Secara teoritis transmigrasi diartikan sebagai sebuah usaha memindahkan atau perpindahan suatu masyarakat dari tertentu ke daerah lainnya.

Rekonsiliasi menurut Fanani (2010) adalah upaya untuk menyelesaikan konflik, khususnya antar komunitas yang luas. Konflik adalah situasi dimana hubungan anggota komunitas atau antara kelompok rusak yang disertai dengan dehumanisasi masing-masing pihak. Tanpa adanya intervensi terhadap para pihak yang terlibat konflik, kebencian, dendam, dan pandangan negatif mengenai pihak lain tidak akan terobati. Rekonsiliasi memungkinkan adanya penyembuhan (*healing*) melalui penemuan kembali nilai kemanusiaan dari masing-masing pihak, pengakuan akan hak-hak korban, dan penyesalan dari pelaku kekerasan yang disertai dengan pemaafan. Dalam rekonsiliasi, nilai keadilan tertentu sangat ditekankan sehingga semua pihak dapat merasakan keikhlasan akan peristiwa masa lalu karena hak-hak mereka telah diakui dan diberikan

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan *review* dan pengembangan penelitian sebelumnya. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif, berlokasi Kota Pontianak dan Kabupaten Pontianak Propinsi Kalimantan Barat, tepatnya di pemukiman yang dikenal dengan relokasi pengungsi korban konflik Sambas.

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi lapangan dengan mengkomparasikan beberapa penelitian. Kemudian, dilakukan wawancara terbatas terhadap informan yang terlibat relokasi, mereka adalah Kepala Dusun Parit Madani, Bhakti Suci serta informan yang ditunjuk oleh informan lainnya. Dalam rangka menda-

patkan data tentang rekonsiliasi, diperoleh informasi melalui individu yang terlibat upaya-upaya perdamaian. Sebagai penunjang dikumpulkan data sekunder yang berasal dari tulisan dan hasil penelitian sebelumnya.

Pengolahan dan penyajian data dilakukan melalui teknik analisis deskriptif, kemudian data yang ada dianalisis berdasarkan kedalaman dan kebutuhan terhadap terciptanya masyarakat harmonis serta terciptanya rekonsiliasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam rangka penanganan konflik yang terbuka dan termanifestasi secara fisik masif, dilakukan penyelamatan berupa evakuasi etnis Madura dari Kabupaten Sambas, kemudian ditempatkan sementara di Kota Pontianak sebagai tahapan pemulihan. Berikutnya adalah penanganan pemulihan trauma pasca konflik, penempatan kembali adalah bagian akhir dari penanganan sebagai alternatif dari terhambatnya rekonsiliasi antara dua suku. Selain dari penempatan kembali di daerah baru, para eks pengungsi korban konflik Sambas melakukan penyisipan mandiri di sekitar Kota Pontianak dan Kabupaten Pontianak dengan biaya yang diberikan oleh pemerintah.

Menyangkut program relokasi sendiri yang merupakan kebijakan utama dalam penanganan akhir dari pengungsian, pemerintah mengenalkan beberapa satuan proyek yang lebih dikenal dengan SP 1, 2, 3, Bhakti Suci 1 dan 2. Dari keadaan tersebut dapat digambarkan tentang pelaksanaan relokasi yang mewujudkan menjadi sebuah pembentukan komunitas baru, dengan kata lain telah terbentuk komunitas baru di tempat baru yang terletak pada beberapa lokasi.

Lebih jelasnya dalam hal ini dalam dilihat pada satuan penempatan yang diberi nama Satuan Proyek (Ulum, 2001:26), sebagai berikut:

Berdasarkan observasi, maka diperoleh data sebagai berikut: Relokasi SP 1 dibangun pada tahun 1999 oleh Departemen Transmigrasi dan PPH Kalbar dengan pola pertanian, terletak di dusun Madani. Luas lahan yang dipergunakan

secara menyeluruh seluas 649 Ha, Berdasarkan hasil wawancara pihak Departemen Transmigrasi waktu itu dijelaskan bahwa SP 1 adalah proyek percontohan dengan mengikuti standar transmigrasi. Sebagai sebuah proyek percontohan, SP 1 di rencanakan sebaik mungkin untuk mendapat dukungan dari berbagai pihak. Selanjutnya daerah tersebut disebut sebagai Dusun Parit Madani, Desa Tebang Kacang, Kecamatan Sei Raya Kabupaten Pontianak (setelah dipecah masuk dalam Kabupaten Kubu Raya).

Relokasi SP 2 dibangun pada tahun 2000 oleh Departemen Transmigrasi dengan pola pertanian. Terletak di Dusun Sari Makmur. Dari rencana 500 unit rumah yang akan dibangun, terrealisasi sebanyak 420 unit rumah ukuran 4X6m. Disebabkan isu munculnya klaim kepemilikan dari masyarakat setempat dan masyarakat desa tetangga tentang tanah yang dijadikan relokasi SP 2, maka masyarakat relokasi SP 2 banyak yang meninggalkan tempat tinggalnya dengan alasan percuma mengelola lahan tidur selama bertahun-tahun kalau akhirnya diambil orang lain.

Relokasi SP 3 dibangun pada tahun 2001 oleh Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kalimantan Barat dengan pola non-pertanian. Terletak di Dusun Madani, tidak jauh dari relokasi SP 1. Rumah yang terbangun sebanyak 380 unit sesuai dengan rencana awal. Pemukiman ini menganut pola non-pertanian, maka masyarakat tidak mendapatkan lahan pertanian sebagaimana di relokasi SP 1 dan SP 2, sehingga masyarakat relokasi SP 3 hanya memanfaatkan lahan pekarangan rumah seluas 0,25 Ha untuk bercocok tanam.

Relokasi Bakti Suci 1 dibangun pada tahun 2001 oleh Dinas Kimpraswil Kalbar dengan pola non-pertanian. Terletak di Dusun Bakti Suci. Rumah yang terbangun sebanyak 350 unit dari rencana semula sebanyak 375 unit. Ukuran rumah 4X6 m. Seperti halnya relokasi SP 3, relokasi Bakti Suci 1 juga tidak mendapatkan lahan pertanian. Kemudian dibangun relokasi terletak di dusun Bakti Suci 2. Lebih lengkapnya bisa dilihat dalam tabel 1.1.

Dalam jangka pendek, para pengungsi di kawasan relokasi cenderung terhindar dari kemungkinan munculnya kerusuhan baru karena rendahnya intensitas interaksi dengan masyarakat luar, tetapi keterbatasan prasarana pembangunan juga membuat kapasitas mereka sangat rendah untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Dengan adanya relokasi tercipta suatu komunitas baru yang tentunya dimaksudkan untuk memenuhi harapan-harapan baru. Melalui program relokasi ini, tercipta suatu bangunan baru masyarakat yang memulai semuanya dari awal. Hal ini tidak cukup memberi ruang terhadap penguatan terhadap kebutuhan utama yaitu terjalinnya kembali hubungan saling membutuhkan baik secara sosial maupun ekonomi serta kebutuhan lainnya.

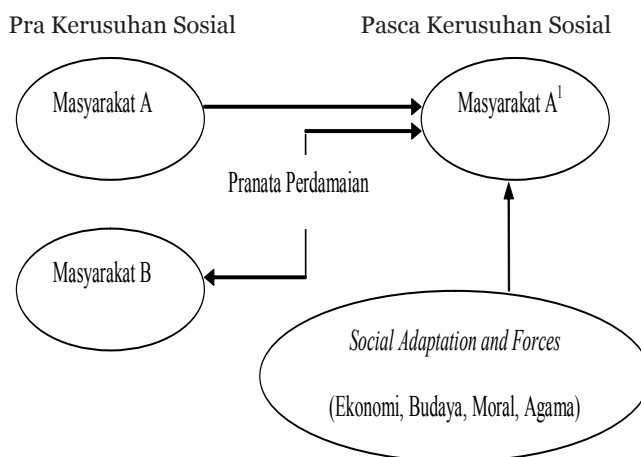
Adapun dari sisi lain, relokasi dapat dilihat dari aspek pembangunan secara positif, etnis Madura dapat membangun kembali kehidupannya dengan lebih baik lagi dibandingkan pada saat mereka berada di Sambas. Setidaknya aspek positif yang dapat dimanfaatkan adalah kedekatan geografis dengan ibukota propinsi, sehingga secara ekonomi lebih strategis, hanya saja infrastruktur belum dapat menunjang kebutuhan ekonomi yang dimaksud.

Inisiasi Perdamaian

Rekonsiliasi sendiri secara faktual telah banyak diupayakan baik oleh Pemerintah maupun lembaga-lembaga non Pemerintah. Adapun menyangkut relokasi, banyak lembaga internasional dan tak sedikit lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang ambil bagian dalam pembangunan kembali pengungsi di relokasi sejak awal penempatan. Program pembinaan pengungsi dari Pemerintah selesai tahun 2002, sedangkan program lembaga internasional umumnya selesai pada tahun 2004, kecuali CRS yang bekerja sama dengan LSM lokal melanjutkan dengan program pertanian berkelanjutan dan *peace building*. Indikasi pembangunan transformatif-berkelanjutan sejauh ini belum muncul. Program belum mampu mendorong munculnya inisiatif masyarakat untuk turut mengendalikan kebijakan dan intervensi program yang terkait dengan upaya

perbaikan kehidupan mereka sebagai bentuk adanya transformasi sosial, demikian urian Kudi-jono (2006:27).

Alur logika yang dapat dibangun terhadap perdamaian di Kalimantan Barat berdasarkan skema yang dikembangkan oleh Beger (1981:37) adalah sebagaimana alur di bawah ini.



Gambar 1: Pranata Perdamaian Pasca Kerusuhan

Kemudian berkaitan dengan peran negara dalam resolusi konflik di Sambas dalam beberapa penelitian dianggap kurang, meskipun dari sisi tahap penyelamatan dan *recovery* bisa dianggap telah memenuhi sebagian kecil kebutuhan ideal dalam rangka penanganan konflik. Aspek penanganan pada tahapan penyelamatan dan pengungsian dapat dianggap sebagai upaya de-eskalasi konflik pada saat itu. Dari hasil kajian terhadap beberapa penelitian, didapatkan sebuah menganalisis tentang peranan negara dalam upaya rekonsiliasi sebagai tujuan akhir dari penanganan konflik dapat dilihat dalam tabel 1.2.

Meskipun pihak pemerintah sendiri terkesan lambat di dalam mengupayakan rekonsiliasi, namun ternyata tidak menutup upaya pihak-pihak untuk melakukan komunikasi, terutama antar pihak yang masih berkaitan keluarga. Hubungan kekeluargaan akibat banyaknya percampuran darah diantara dua etnis yang bertikai, ternyata cukup efektif dalam menyambungkan komunikasi sebagai awal penjajagan hubungan satu sama lain. Menurut pengakuan informan yang selama ini kerap melakukan komunikasi, senyatanya

mereka terhubung oleh keterikatan persaudaraan. Komunikasi secara informal dimanfaatkan untuk membangun kembali citra etnis Madura terhadap etnis Melayu di Sambas, sehingga secara alamiah terbangun suatu hubungan informal. Hubungan tersebut menjalinkan keinginan satu sama lain, dalam hal ini bagaimana orang Madura bisa menyampaikan kesan positif kepada etnis Melayu di Sambas tentang keinginan mereka untuk bisa keluar masuk Sambas dengan aman. Olahan tentang perkembangan rekonsiliasi secara alamiah dilihat dalam tabel 2.3.

Dapat dipahami bahwa residu tentang adanya keterikatan emosional masih ada diantara mereka, hanya saja belum memberikan indikator signifikan terciptanya suatu rekonsiliasi yang mendasar pada tingkatan re-integrasi. Dalam hal ini diperlukan pihak lain untuk merangkai suatu pola hubungan yang lebih baik. Selama ini hubungan dapat dilakukan melalui komunikasi *person to person* yang melahirkan pesan kegiatan hubungan. Selama ini mediasi telah dilakukan meskipun hasilnya belum memuaskan, hal ini dapat dilihat dalam tabel 2.4.

Makna relasi bagi masyarakat selama ini adalah identitas dan hubungan intersubjektif, etnis Madura dianggap eksklusif begitu juga dengan pandangan etnis Madura yang menganggap etnis lain yang sulit membuka diri terhadap mereka. Berdasarkan cara pandang seperti ini, prasyarat utama dalam upaya perdamaian pasca konflik di Kalbar belum tampak.

Menyangkut hal ihwal pesimisme, Munawar (2009:22) melihat bahwa interaksi antara masyarakat Madura dan Melayu pascakerusuhan Sambas tidak memiliki masa depan yang cerah, karena perbedaan kultur/budaya antara kedua etnis (masyarakat) sangat tajam, acapkali memunculkan benturan, dan diperburuk oleh lemahnya penegakan hukum. Dengan demikian, suatu pandangan yang dibangun atas dasar ketidakmungkinan dapat menimbulkan asumsi negatif terhadap setiap proses.

Pandangan Munawar Saad dapat dikomparasikan dengan Giring (2004:39) melihat

bahwa suatu pencitraan itu bergerak dinamis, sebagai contoh menurutnya pencitraan hubungan antara orang Madura dan Dayak Kanayatn tidak statis pada satu asumsi karena elemen-elemen luar adalah bagian dari relasi sosio-kultural orang Dayak Kanayatn turut serta terlibat dalam mengembangkan suatu pranata. Lebih lanjut, citra itu dapat dibangun berdasarkan konstruksi elemen-elemen sosio-kultural internal kedua pihak yang dapat diintervensi oleh elemen lain misalnya pemerintah yang memiliki kewenangan cukup kuat.

Terciptanya suatu rekonstruksi hubungan antar etnis dan perdamaian pasca konflik tetap terbuka. Lemahnya penegakan hukum, menurut Cahyono (2008) merupakan salah satu faktor makro yang melemahkan proses perdamaian di Kalbar, dianggap berbeda dengan Kalimantan Tengah. Oleh karena itu, penegakan hukum menjadi syarat untuk menggerakkan perdamaian.

Sebuah perdamaian memerlukan suatu syarat adaptasi dari masyarakat yang terlibat, melalui apa yang disebut Beger (1981:43) sebagai legitimasi, yaitu objektivikasi makna “dunia kedua” (*second order*). Lebih lanjut, Subro menjelaskan faktor legitimasi menghasilkan makna baru dan berfungsi menciptakan objektivikasi dan kepuasan subjektif atas “dunia pertama” (*first order*) yang telah menjadi pranata (*institutionalized*) sebelumnya. Dengan kata lain kalau manusia, dan juga masyarakat, memiliki bakat berdamai dalam “dunia pertama”-nya, namun suatu waktu dikacaukan oleh konflik kekerasan, maka kemampuan adaptif masyarakat korban konflik kekerasan untuk menerima perdamaian merupakan legitimasi. Legitimasi ini memungkinkan suatu penciptaan makna baru pada tahapan akhir dari penyelesaian konflik yang berakhir dengan damai secara substantif. Dalam hal ini, baik etnis Madura maupun Melayu dapat menciptakan suatu keterikatan baru yang lebih baik.

Hambatan Perdamaian

Relokasi sampai saat ini dianggap sebagian kalangan menjadi satu hal yang menghambat hubungan antar dalam hal kepentingan mereka

untuk menjalin kembali persaudaraan yang sempat pecah. Masyarakat pengungsi sendiri perhatiannya dominan pada sisi survival dan upaya membangun kembali kehidupan sosial ekonomi mereka, ada atau tidak perdamaian. Sedangkan dari sisi pemerintah menganggap bahwa persoalan konflik telah selesai.

Masyarakat Melayu di Kabupaten Sambas menganggap semua telah berjalan dengan semestinya dengan mengabaikan kepentingan satu sama lain akan perdamaian. Hal ini menempatkan dua komunitas etnis untuk selalu pengonsentrasikan diri pada asumsi masing-masing terhadap kebutuhan hubungan rekonsiliasi seakan tidak lagi diperlukan di masa mendatang.

Berkaitan dengan belum adanya titik temu antara Madura dengan Melayu pada poin-poin kritis, sangat dipengaruhi oleh kurangnya sikap saling memahami di antara kedua belah pihak sebagaimana dikemukakan Ulum (2001) seperti:

1. Orang Madura tidak memahami betapa mendalamnya trauma psikologis orang Melayu Sambas yang selama bertahun-tahun hidup menganggap diri mereka berada dibawah “tekanan” orang Madura.
2. Orang Sambas sendiri tidak memahami betapa orang Madura sangat menginginkan pergi keluar masuk daerah Sambas dengan tenang dan damai atas tujuan:
3. Mengurus tanah yang ditinggalkan dengan alasan ingin menjualnya dengan harga yang wajar.
4. Berziarah kubur. Orang Sambas tidak memahami betapa dekatnya orang Madura dengan kuburan.

Di lain hal, terdapat tiga kelompok yang berkepentingan agar Madura tidak kembali ke Sambas yakni, anak-anak muda yang terpolarisasi oleh faktor trauma. Kemudian para politisi yang membuat keadaan menjadi lebih rumit. Keadaan mengambang antara ada perdamaian atau tidak justru menjadi bagian dari opini yang dimanfaatkan untuk menguatkan posisi secara

politis. Kelompok berikutnya adalah mereka yang berkepentingan dengan tanah-tanah yang ditinggalkan oleh orang Madura.

Demikian pembahasan tentang keadaan yang terjadi diantara dua etnis yang bertikai, dapatlah dipahami kebutuhan satu sama lain akan suatu hubungan yang baik dengan pencitraan yang baik juga. Hal ini membutuhkan suatu langkah awal melalui penciptaan opini di masing-masing pihak tentang suatu cara yang bermartabat dan penuh pengertian.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan pembahasan dan temuan-temuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa prospek membangun kembali hubungan etnis Madura dan Melayu ke dalam suatu tatanan masyarakat yang harmonis cukup baik, dengan kata lain rekonsiliasi sosial bukanlah suatu hal yang mustahil. Tentunya, keadaan ideal yang diinginkan perlu didesain melalui pendekatan konstruk sosial yang mengandalkan elemen luar terutama kebijakan. Kemudian disambungkan dalam suatu hubungan komunikasi antar elemen secara intergratif.

Relokasi merupakan tindakan eksklusif untuk mengatasi problem pengungsian yang acap kali menimbulkan ketegangan dengan masyarakat sekitar Kota Pontionak, sehingga dirasa perlu untuk memberikan mereka suatu akses ekonomi untuk mengurangi dampak karean hak-hak dasar yang direnggut. Relokasi memiliki dampak positif terutama dalam hal memenuhi kebutuhan ekonomi bagi korban kerusakan, setidaknya mereka dapat melanjutkan hidup dan bertahan sedemikian waktu berjalan. Meskipun pada sisi lain menjadi penghambat terhadap proses alami rekonsiliasi. Pola pengonsentrasian etnis Madura pada suatu pembentukan komunitas baru dapat menimbulkan citra eksklusifitas model lain dari ketertuduhan selama ini sebagai kelompok eksklusif, sehingga menyulitkan pembentukan opini yang prospektif bagi rekonsiliasi. Bahkan, dengan melihat akselerasi perubahan yang ada, aspek

ekonomi di tempat baru dianggap lebih strategis dibandingkan dengan saat mereka di Sambas. Sedangkan dari aspek sosial, relokasi memberikan kesempatan untuk membangun sebuah masyarakat baru sedari awal.

Hambatan rekonsiliasi sebenarnya disebabkan juga oleh faktor-faktor internal masing-masing kedua suku karena banyaknya kelompok kepentingan yang tidak menginginkan orang Madura kembali ke Sambas.

Untuk itu, keterlibatan mediator atau bisa disebut dengan elemen luar diperlukan terutama dalam kerangka intervensi terhadap rekonsiliasi dua etnis yang bertikai, aspek penegakan hukum serta pembangunan fasilitas untuk mediasi komunikasi bisa terlaksana dengan baik dan terstruktur. Pemerintah adalah kunci dalam penyelesaian secara tuntas problema sosial yang terjadi, karena elemen lain tidak cukup strategis untuk memasuki persoalan sampai ke akar. Begitu juga keterlibatan elemen LSM, organisasi masyarakat perlu melakukan intervensi sosial dan budaya melalui serangkaian program kerjasama yang dapat memberikan rasa kepercayaan satu sama lain.

Saran

Satu hal yang sangat diperlukan dalam penyelesaian konflik adalah kebijakan negara yang menyiapkan suatu konstruk baru hubungan kedua etnis yang bertikai.

Keterlibatan lebih serius lagi elemen luar selain negara, misalnya tokoh etnis lain yang menjembatani dialog antara dua etnis yang bertikai.

DAFTAR PUSTAKA

- Atok, K. dkk. 2005. *Membangun Relasi Etnis Pembelajaran dari Beberapa Kampung di Kalimantan Barat*. Jakarta: Era Grafia.
- Beger, Peter L dan Thomas Luckman. 1981. *The Social Construction of Reality*. New York: Penguin Books.
- Cahyono, H. dkk. 2008. *Konflik Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah Jalan Panjang Meretas Perdamaian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar-P2P LIPI.
- Coper A, Lewis <http://id.wikipedia.org/wiki/Teori-konflik>.
- Fanani, Ahmad. 2010. Pendekatan Restorasi Circle (Lingkaran Pemulihan) dalam Rekonsiliasi. (<http://wmc-iainws.com/detail-artikel.php?id=37>, diakses 26 Oktober 2011)
- Giring. 2004. *Madura di Mata Dayak dari Konflik ke Rekonsiliasi*. Yogyakarta: Galang Press.
- Jamil, M Mukhsin. 2007. *Mediasi dan Resolusi Konflik*. Semarang: Walisongo Median Center.
- Kritinus. 2009. *Kisah Penting dari Kampung Orang Dayak dan Madura di Sebangki*. Pontianak: STAIN Pontianak Press.
- Kusdijono. 2006. *Evaluasi Program Pemulihan dan Pembangunan Pengungsi Madura Pasca Kerusuhan di Kalimantan Barat: Studi Kasus di Tiga Satuan Relokasi di Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Pontianak*. Tesis, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Depok: Universitas Indonesia.
- Pruitt, Dean G dan Rubin, Jeffrey Z. 2009. *Teori Konflik Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Purwana, Bambang Hendarta Suta. 2003. *Konflik antar Komunitas Etnis di Sambas 1999 Suatu Tinjauan Sosial Budaya*. Pontianak: Remeo Grafika Pontianak.
- Ross, M.G and B.W, Lappin. 1967. *Community Organization: Theory, Principles and Practice*, Secon Edition. New York: Harper & Row Publisher.
- Saad, M. Munawar. 2009. *Sejarah Konflik Antar Suku di Kabupaten Sambas*. Pontianak: STAIN Pontianak Press.
- Subro. 2011. *Suara Kami Buat Perdamaian*. Pontianak: Cordaid-Caireu-YSDK-STAIN Pontianak Press.

Supriyadi, Y. 2011. Konflik di Kalimantan Barat. (<http://www.akademikayak.com/2008/03/tentang-konflik-di-kalbar.html> diakses tanggal 10 Oktober 2011, 21.00)

Relokasi Korban Konflik Sambas, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Pontianak: Universitas Tanjung Pura.

Ulum, Raudlatul. 2001. Pelaksanaan Proglam

LAMPIRAN

Tabel 1 : Realisasi Pembangunan Program Relokasi Korban Konflik Sambas

No	Nama Lokasi	Daya Tampung (KK)	Realisasi Pembangunan Rumah (Unit)	Tahun Pelaksanaan	Pola
1	SP 1	500	500	1999	Pertanian
2	SP 2	500	420	2000	Pertanian
3	SP 3	380	380	2001	Non-pertanian
4	Bakti Suci 1	375	350	2001	Non-pertanian
5	Bakti Suci 2	200	200	2002	Non-pertanian

Sumber data: Raudatul Ulum. Hasil observasi dan pengumpulan data dari berbagai sumber.

Tabel 2 : Peranan Negara Dalam Resolusi Konflik Di Kalbar

Tahapan Resolusi Konflik	Program atau Tindakan	Perkembangan
De-eskalasi Konflik Jangka Pendek	Aparat keamanan dalam jumlah yang sangat terbatas mencoba meredam konflik yang berada di desa sumber konflik Aparat yang diterjunkan tidak netral	Polsek dan Koramil tidak lagi mampu mengendalikan situasi, dan tidak mampu segera mencegah berlanjutnya kekerasan Aparat gagal melokalisasi kerusuhan dan pemblokiran, sehingga kerusuhan meluas Aparat gagal mencegah jatuhnya banyak korban jiwa dan
Jangka Panjang	Negara kurang mendorong surutnya perasaan saling membenci di antara pihak-pihak yang berkonflik Dalam konteks Sambas: Pemda setempat turut mendukung dan menyebarkan hidden agenda untuk menolak Madura kembali ke bumi Melayu (Sambas) Negara gagal memainkan memainkan peranan de-eskalasi karena Negara belum menemukan cara-cara pemecahan masalah yang dapat dikatakan adil bagi pihak Madura	Di kalangan masyarakat maupun kalangan elite, perasaan “membenci” etnis Madura masih tumbuh subur Pendekatan resolusi konflik yang digunakan ialah “pendekatan alamiah yang cenderung pembiaran”, yang secara sepihak menguntungkan etnis Melayu Sambas tapi sangat merugikan warga
Intervensi kemanusiaan dan negosiasi politik	Pemprov melakukan relokasi pengungsian dan program pemberdayaan Surat edaran Bupati Sambas tentang intervensi tanah-tanah Madura Program pemerintah untuk resolusi konflik hampir dikatakan tidak ada	Tidak ada koordinasi antara Pemprov dan Pemkab Sambas Pemkab Sambas merasa ditinggalkan atau tidak dilibatkan Pemda tidak serius sehingga banyak tanah milik orang Madura yang dikuasai oleh orang Melayu, oleh pemerintah desa, atau disita sebagai “rampasan perang”

Sumber data: Konflik Kalbar dan Kalteng 2009

Tabel 3 : Perkembangan Pendekatan Informal dan Alamiah

Nama Kegiatan	Peranan	Output
Orang Melayu Sambas bebas lalu-lalang dengan aman di terminal Batu Layang (Kota Pontianak)	Orang Melayu Sambas akan bercerita di kampung halamannya, bahwa mereka diperlakukan dengan baik dan aman di terminal Batulayang	Diplomasi budaya
Orang Sambas mengunjungi sanak keluarganya di relokasi pengungsian	Orang Madura membuktikan bahwa tempat relokasi merupakan tempat yang aman bagi orang Melayu Sambas	Diplomasi budaya
Acara pernikahan antara wanita Madura dengan lelaki Melayu di Sambas, keluarga Madura boleh hadir dan tinggal di Sambas selama prosesi pernikahan berlangsung	Orang Sambas memberikan atau membuka sedikit pintunya bagi masuknya orang Madura ke Sambas	Diplomasi budaya
Acara pertandingan olahraga atau kesenian, dimana peserta dari Madura bisa hadir dengan aman	Orang Sambas memberikan atau membuka sedikit pintunya bagi masuknya orang Madura ke Sambas	Diplomasi budaya

Sumber Data: Konflik Kalbar dan Kalteng

Tabel 1.4: Peranan Mediator Untuk Resolusi Konflik

Jenis Lembaga	Peran	Output
LSM	Mengadakan kegiatan dialog-dialog Bantuan pangan Bantuan fisik Bantuan pengadaan air bersih	Sebatas dialog-dialog, belum ada <i>follow up</i> untuk mendorong resolusi konflik. Satu dua LSM justru dibentuk untuk mobilisasi politik
Partai Politik	Secara sadar enggan terlibat karena mengurus resolusi konflik merupakan isu yang kontraproduktif bagi partai	Nihil
Ikatan-ikatan Etnis Eksklusif	Masing-masing bersifat eksklusif dan hamper-hampir tidak ada kerja sama	Sukar untuk mempertemukan antar-identitas
Organisasi Lintas Etnis Forum Komunikasi Masyarakat Kalimantan Barat (FKMKB)	Praktis tidak memiliki program	Nyaris tidak efektif Anggota tidak terlibat secara sepenuh hati
Institusi keagamaan	Kecil	Sulit mencari figur tokoh agama yang dihormati oleh kedua belah pihak Figur ulama tidak turun langsung ketika konflik berlangsung, untuk mengamankan situasi

Sumber Data: Buku Konflik Kalbar dan Kalteng